



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024



Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2023



BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dengan Peraturan Daerah sebagai perwujudan pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Seri E).

34. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 18 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala BAPELITBANGDA adalah Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Probolinggo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 disusun dengan maksud :

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 memuat Matrik Rencana Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif pendanaan dan Perangkat Daerah pelaksana menurut bidang urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 5

Penjabaran RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai bahan masukan serta hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 dituangkan dalam APBD Kabupaten Probolinggo yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Juli 2023

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO


H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

DAFTAR ISI

Daftar Isi			i
Daftar Tabel			iii
Daftar Gambar			vi
BAB I	PENDAHULUAN	I -	1
1.1	Latar Belakang	I -	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I -	2
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I -	7
1.4	Maksud dan Tujuan	I -	8
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I -	8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II -	1
2.1	Kondisi Umum Daerah	II -	1
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	II -	2
2.1.1.1	Kondisi Geografi	II -	2
2.1.1.2	Kondisi Demografi	II -	14
2.1.1.3	Potensi Pengembangan Wilayah	II -	29
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II -	32
2.1.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II -	32
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II -	43
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II -	54
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	II -	59
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II -	112
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD	II -	115
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II -	518
2.3.1	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II -	518
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II -	522
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III -	1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III -	2
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021	III -	3
3.1.2	Perkiraan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2021	III -	9
3.1.3	Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023 dan 2024	III -	12
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III -	17
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III -	18
3.2.2	Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah	III -	25
3.2.3	Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	III -	26
3.2.4	Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	III -	27
3.2.5	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III -	33
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV -	1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV -	1
4.2	Prioritas Pembangunan	IV -	17
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV -	18
4.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur	IV -	20
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo	IV -	22

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V -	1
	5.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan	V -	1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI -	1
	6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama	VI -	1
	6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI -	3
BAB VII	PENUTUP	VII -	1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	II -	3
Tabel	2.2	Sungai di Kabupaten Probolinggo	II -	4
Tabel	2.3	Danau atau Ranu di Kabupaten Probolinggo	II -	5
Tabel	2.4	Ketinggian Per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo	II -	7
Tabel	2.5	Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo (Ha)	II -	8
Tabel	2.6	Jumlah Rata-rata Curah Hujan dan Rata-rata Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021	II -	9
Tabel	2.7	Luas Peruntukan Kawasan Lindung (Ha) di Kabupaten Probolinggo	II -	11
Tabel	2.8	Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Probolinggo	II -	13
Tabel	2.9	Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya (Ha) di Kabupaten Probolinggo	II -	15
Tabel	2.10	Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II -	17
Tabel	2.11	Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Probolinggo	II -	25
Tabel	2.12	Arahan Ketentuan Perijinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Disinsentif dan Arahan Sanksi pada Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Probolinggo	II -	28
Tabel	2.13	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II -	32
Tabel	2.14	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Probolinggo	II -	33
Tabel	2.15	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017 – 2021	II -	36
Tabel	2.16	Tingkat Capaian Kinerja Makro Sosial Kabupaten Probolinggo	II -	42
Tabel	2.17	Nilai IPM Kabupaten Probolinggo dan Komponennya Tahun 2017 – 2021	II -	43
Tabel	2.18	Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – 2021	II -	50
Tabel	2.19	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 - 2021	II -	52
Tabel	2.20	Capaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum	II -	55
Tabel	2.21	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	II -	60
Tabel	2.22	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan	II -	60
Tabel	2.23	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	II -	62
Tabel	2.24	Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan	II -	64
Tabel	2.25	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	II -	68
Tabel	2.26	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	II -	69
Tabel	2.27	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	II -	70
Tabel	2.28	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	II -	71
Tabel	2.29	Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	II -	72
Tabel	2.30	Realisasi Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja	II -	73
Tabel	2.31	Jenis Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II -	75
Tabel	2.32	Realisasi Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II -	75
Tabel	2.33	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	II -	77
Tabel	2.34	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial	II -	78
Tabel	2.35	Data Ketersediaan Pangan utama per komoditi	II -	80
Tabel	2.36	Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Probolinggo	II -	81
Tabel	2.37	Gambaran kondisi kebinamargaan 5 tahun terakhir:	II -	91

Tabel	2.38	Gambaran kondisi perhubungan 5 tahun terakhir	II -	92
Tabel	2.39	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pendidikan	II -	95
Tabel	2.40	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Kesehatan	II -	123
Tabel	2.41	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II -	143
Tabel	2.42	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II -	156
Tabel	2.43	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	II -	160
Tabel	2.44	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Sosial	II -	176
Tabel	2.45	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Tenaga Kerja	II -	183
Tabel	2.46	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II -	193
Tabel	2.47	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pangan	II -	197
Tabel	2.48	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pertanahan	II -	206
Tabel	2.49	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	II -	209
Tabel	2.50	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II -	219
Tabel	2.51	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II -	232
Tabel	2.52	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II -	241
Tabel	2.53	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Perhubungan	II -	245
Tabel	2.54	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	II -	257
Tabel	2.55	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II -	268
Tabel	2.56	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Penanaman Modal	II -	275
Tabel	2.57	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	II -	279
Tabel	2.58	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Stastistika	II -	283
Tabel	2.59	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Persandian	II -	285
Tabel	2.60	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Kebudayaan	II -	287
Tabel	2.61	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	II -	293
Tabel	2.62	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	II -	300
Tabel	2.63	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pilihan Pariwisata	II -	310
Tabel	2.64	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pilihann Pertanian	II -	314
Tabel	2.65	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Urusan Pilihan Perdagangan, dan Perindustrian	II -	330
Tabel	2.66	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II -	338

Tabel	2.67	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II -	348
Tabel	2.68	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Unsur Kewilayahan	II -	379
Tabel	2.69	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Unsur Pemerintahan Umum	II -	508
Tabel	3.1	Distribusi PDRB Berdasar Lapangan Usaha Pasca Covid- 19	III -	6
Tabel	3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Kapasitas Fiskal Tahun 2023	III -	21
Tabel	3.3	Gambaran APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2002 s/d Bulan Mei 2022	III -	32
Tabel	3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 s.d 2021	III -	35
Tabel	4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	IV -	3
Tabel	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2020	V -	4
Tabel	6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023	VI -	1
Tabel	6.2	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI -	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1.	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I -	9
	1.2	Bagan keterkaitan RKPD Kabupaten dengandokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Nasional	I -	11
Gambar	2.1.	Peta Adminitrasi Kabupaten Probolinggo	II-	2
Gambar	2.2.	Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo	II-	3
Gambar	2.3.	Kondisi Eksisting Kawasan Lindung Kabupaten Probolinggo	II-	12
Gambar	2.4.	Kondisi Eksisting Kawasan Budidaya Kabupaten Probolinggo (%)	II-	14
Gambar	2.5.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 2017-2021	II-	16
Gambar	2.6.	Perkembangan Kepadatan Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II-	18
Gambar	2.7.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II-	18
Gambar	2.8.	Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Probolinggo Tahun 2021	II-	20
Gambar	2.9.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Probolinggo	II-	21
Gambar	2.10.	Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Probolinggo	II-	29
Gambar	2.11.	Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II-	31
Gambar	2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II-	35
Gambar	2.13	Inflasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2020	II-	37
Gambar	2.14	Laju Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021 (dalam Rp)	II-	39
Gambar	2.15	Gini Ratio Kabupaten Probolinggo Tahun 2017- 2021	II-	40
Gambar	2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Probolinggo Tahun 2017-2021	II-	41
Gambar	2.17	Komponen IPM Kabupaten Probolinggo Tahun 2017–2021	II-	43
Gambar	2.18	IPM Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 -2021	II-	44
Gambar	2.19	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – 2021	II-	45
Gambar	2.20	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 -2021	II-	47
Gambar	2.21	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 – 2022	II-	47
Gambar	2.22	Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Menurut Subkategori Tahun 2017 – 2021	II-	82
Gambar	2.23	Distribusi Persentase PDRB Sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Tahun 2021	II-	83
Gambar	2.24	Produksi Padi (Ton), Produktifitas (Ton/Ha), Luas Panen(Ha)	II-	84
Gambar	2.25	Perkembangan Produksi Padi Kab. Probolinggo dan sekitarnya Tahun 2021	II-	85
Gambar	2.26	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Probolinggo Tahun 2018 – 2021	II-	93

Gambar	3.1	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2021	III-	3
Gambar	3.2	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Kabupaten Probolinggo (Rupiah) Tahun 2019-2021	III-	3
Gambar	3.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo pada masa Pemulihan Ekonomi Tahun 2016-2020	III-	4
Gambar	3.4	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral pada masa Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2021	III-	5
Gambar	3.5	Laju Inflasi Probolinggo Periode Februari 2020 – April 2022 (%)	III-	8
Gambar	3.6	Laju Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2020 (dalam Rp.)	III-	9
Gambar	3.7	Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur	III-	11
Gambar	3.8	Inflasi pada 8 Kota dan Jawa Timur Bulan April 2021 (%)	III-	11
Gambar	4.1	Visi, Misi, Arahana Presiden dan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	IV-	5
Gambar	4.2	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024	IV-	6